

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA****Yois Nelsari Malau, Delyanti Azzumarito Pulungan**

Universitas Prima Indonesia

yoisnelsarimalau@gmail.com, delyanti.pulungan@gmail.com

**ABSTRAK**

Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah pusat dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Salah satu komponen terpenting yang terdapat di dalam APBD yaitu belanja modal. Belanja modal sangat penting dalam keterkaitan keberlangsungan kegiatan pemerintah. Melalui belanja modal diharapkan anggaran yang telah disusun pada APBD dapat terealisasi dengan baik dan benar dengan cara meningkatkan pelayanan kepada publik yang digunakan dalam rangka memperoleh dan menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empirik pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk kabupaten belanja modal daerah/kota di provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah realisasi dari laporan anggaran dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2013-2017.

**Kata kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja Modal**ABSTRACT**

*The amendment of Law Number 22 Year 1999 to Law Number 32 Year 2004 is one of the policies adopted by the central government in which local governments are given broad authority to manage their own households with a little help from the central government. In addition, local governments also have broad rights and authority to use their financial resources in accordance with the needs and aspirations of the people who are developing in the area. One of the most important components contained in the APBD is capital expenditure. Capital expenditure is very important in relation to the sustainability of government activities. Through capital expenditure, it is expected that the budget prepared in the APBD can be realized properly and correctly by improving public services used in order to obtain and add fixed assets and other assets that benefit more than one accounting period and exceed the minimum capitalization limit of fixed assets or other assets determined by the government where the assets are used for the daily operations of a work unit and not for sale. This study aims to test and empirically prove the effect of economic growth, regional original income, general allocation funds, special allocation funds for district / city capital expenditure districts in North Sumatra province. The population in this study is the realization of the budget reports from 33 districts / cities in North Sumatra for the period 2013-2017.*

**Keywords:** Economic Growth, PAD, DAU, DAK, Capital Expenditures

**PENDAHULUAN**

Dalam era otonomi sekarang ini, pembiayaan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan fiskal di daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan alokasi belanja daerah terutama alokasi belanja modal. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar & Siswanto, 2012).

Belanja Modal Belanja modal menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71, 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 31, 2016) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2017, alokasi belanja modal secara nasional pada tahun anggaran 2017 sebesar 21,11% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi 16,91% dari total belanja daerah dan untuk pemerintah kabupaten/kota 23% dari total belanja daerah.

**Tabel 1.1 Total Penerimaan APBD dan Total Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2013-2017**

Tahun	Penerimaan APBD	Belanja Modal	%
2013	28.189.517.220	7.097.304.089	25,18
2014	31.686.141.284	7.127.585/036	22,49
2015	38.992.855.528	7.794.250.954	19,99
2016	40.614.246.253	8.735.879.217	21,51
2017	44.536.439.825	10.570.413.852	23,73

Sumber: BPS Sumut, 2013-2017

Sulit untuk menentukan berapa besar sebenarnya alokasi belanja publik yang ideal di

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengingat kompleksitas masalah pembangunan daerah, karakteristik daerah, serta celah fiskal antara kemampuan dana dan kebutuhan pembangunan di daerah yang berbeda-beda (Kumorotomo, 2011).

Pada pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara, alokasi belanja modal tahun anggaran 2013 sebesar 25,18% dari total penerimaan APBD Tahun 2013, untuk tahun 2014 sebesar 22,49%, tahun 2015 19,99%, tahun 2016 sebesar 21,51% dan tahun 2017 sebesar 23,73% dari total penerimaan APBD.

Kondisi ini menggambarkan bagaimana pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara tidak memprioritaskan alokasi belanja untuk belanja modal, padahal belanja modal ini lah yang langsung dirasakan masyarakat melalui pembangunan baik infrastruktur dan pelayanan publik bahkan realisasi belanja modal juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Kondisi dan fenomena pengalokasian belanja modal diatas menarik peneliti untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja dalam komponen penerimaan APBD yang mempengaruhi jumlah pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk menguji dan menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan gambaran ekonomi tetapi suatu proses untuk melihat perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu (Boediono, 2013).

Paradigma pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk kelestarian lingkungan, dan kebijakan yang tepat untuk pertumbuhan berkelanjutan secara sosial (Xue et al, 2017).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat jelas, karena tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah yang bersangkutan (Sjafrizal, 2017).

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014) tentang Pemerintahan Daerah, pasal 157 dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Variabel Pendapatan Asli Daerah diukur dengan rumus

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

### **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut (Halim, 2014) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat "block grant", sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. DAU dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan formulasi alokasi. Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan menerima DAU sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan.

Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan (Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 2014), DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah didasarkan pada alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil

akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Indikator DAU adalah sebagai berikut:

- a. Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran atau belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif.
- b. Dari penerimaan daerah, terdiri dari: penerimaan daerah, indeks industri, indeks sumber daya alam (SDA), indeks sumber daya manusia (SDM)

Pengukuran variabel DAU ini diukur dengan skala rasio. Adapun dalam pengukuran DAU dapat dilakukan dengan perhitungan:

$$\text{DAU} = \text{Cela Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Keterangan:

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

### **Dana Alokasi Khusus**

Menurut (Halim, 2014), dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Berdasarkan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23, 2014), DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Besaran DAK ditentukan setiap tahun dalam APBN. DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan

dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Kriteria pengalokasian DAK terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memenuhi kriteria yang ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK. Dengan demikian, tidak semua daerah mendapatkan alokasi DAK.

Adapun indikator DAK adalah sebagai berikut:

1. Umum: dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.
2. Khusus: dirumuskan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah serta berdasarkan kewilayahan oleh menteri keuangan yang terkait.
3. Teknis: disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK serta dirumuskan berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

**Belanja Modal**

Menurut (Badrudin, 2017), belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
5. Belanja Modal Fisik Lainnya.

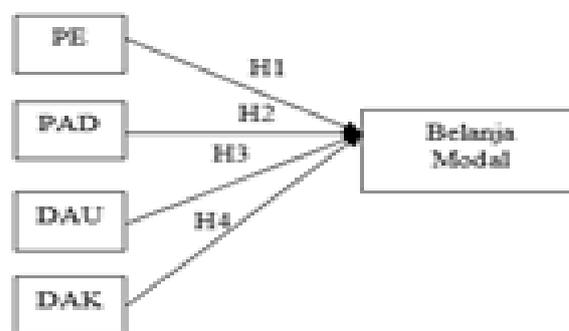
Variabel belanja modal dapat diukur dengan:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap lainnya}$$

Belanja Modal Pemerintah Menurut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71, 2010), belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

**Kerangka Konseptual**

Pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah pendapatan asli daerah, jumlah dana alokasi umum dan jumlah dana alokasi khusus. Beberapa hasil penelitian terdapat perbedaan faktor mana yang paling besar pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal. Oleh karena pendapat peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

**METODE PENELITIAN**

Data adalah suatu syarat dapat atau tidaknya suatu model di analisis. Jenis data penelitian yang

digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Perimbangan Kueangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara serta beberapa penerbitan yang mendukung dan berhubungan dengan kajian ini. Cakupan spasial studi adalah seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yaitu 33 Kabupaten/Kota, dengan series data 5 tahun dari tahun 2013-2017.

Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif dengan menggunakan data sekunder dilakukan untuk melihat karakteristik dari variabel yang diamati dari tahun ke tahun untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kondisi variabel yang terkait dengan variabel bebas, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan metode pengujian model ekonometrika. Pengolahan data pada penelitian ini, dalam menganalisis data menggunakan software Microsoft Excel 2007 dan kemudian diolah menggunakan E-Views 9.0.

Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan model regresi data panel. Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linier berganda. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y=f(X_1, X_2, X_3, X_4).....(1)$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model persamaan linear berganda (*multiple regression*) dengan spesifikasi model seperti dibawah ini, sehingga model itu berubah menjadi bentuk linier, seperti dibawah ini:

$$\text{Log}(BM_{it})=\alpha+\beta_1 \text{log}(X_{1it})+\beta_2 \text{log}(X_{2it})+\beta_3 \text{log}(X_{3it})+\beta_4 \text{log}(X_{4it})+\varepsilon_{it}.....(2)$$

Untuk memudahkan analisis, penulisan intersep  $\alpha$  diganti dengan  $\beta_0$  dan variabel gangguan  $\varepsilon_{it}$  diganti dengan  $v_{it}$  sehingga model regresi umum data panel dari persamaan (2) dapat ditulis kembali dalam bentuk log linier sebagai berikut:

$$\text{Ln}(BM_{it})=\beta_0+\beta_1 \text{ln}(X_{1it})+\beta_2 \text{ln}(X_{2it})+\beta_3 \text{ln}(X_{3it})+\beta_4 \text{ln}(X_{4it})+v_{it}.....(3)$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Y : Belanja Modal (BM)
- $\beta_0$  : Intersep
- $X_1$  : Pertumbuhan Ekonomi (PE)
- $X_2$  : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- $X_3$  : Dana Alokasi Umum (DAU)
- $X_4$  : Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Ln : Logaritma
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$  : Koefisien Regresi
- $v_{it}$  : Error Term
- t : waktu

**Regresi Data Panel**

**1. Common Effect**

Model regresi *common effect* merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel, hanya dengan menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model dapat diestimasi dengan metode *ordinary least square* (OLS).

**2. Fixed Effect**

Asumsi yang dipakai dalam model regresi *fixed effect*, bahwa intersep adalah berbeda antara individu sedangkan slopenya tetap sama antar individu. Untuk mengestimasi model *fixed effect* adalah menggunakan metode teknik variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *least square dummy variables* (LSDV).

**3. Random Effect**

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun, ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) dikenal sebagai *random effect*.

**Uji Signifikan Model**

Selanjutnya untuk menguji masing-masing model sebagai berikut: (Widarjono, 2013)

**1. Uji signifikansi model Fixed Effect**

Uji signifikan ini bertujuan untuk menentukan model yang paling baik, antara fixed effect

atau *common effect*.

2. Uji Signifikansi model *Random Effect*

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari model common effect. Pengujian dilakukan dengan statistik uji Lagrange Multiplier (LM) yang dikembangkan oleh Beusch-Pagan (uji Beusch-Pagan).

Uji signifikansi Fixed Effect atau Random Effect Uji ini dilakukan apabila berdasarkan hasil pengujian diatas ternyata model fixed effect dan random effect lebih baik dari metode common effect. Pengujian dilakukan untuk memilih model yang paling baik antara model fixed effect atau random effect.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pemilihan Model Dengan Uji Hausman**

Pemilihan model dalam penelitian ini menggunakan uji Hausman untuk memilih model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Berikut ini tabel hasil uji Hausman

Tabel 1. Hasil Uji Hausman

Model	Hausman Test	Chi Square	Hasil
$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JP_{it} + \beta_3 AP_{it} + u_{it}$	0.0000	271.125386	<i>Random Effect</i>

Sumber : Hasil Olahan Data, Eviews, 2019

Nilai Prob yang lebih kecil dari 0.05 menunjukkan kondisi ditolaknya  $H_0$ . Dalam hal ini  $H_0$  nya adalah Model random lebih baik dibandingkan model *Fixed Effect*. Sehingga karena nilai prob nya = 0.0000, maka dengan tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa untuk data yang miliki model *Random effect* lebih sesuai digunakan.

**Hasil Estimasi Model Random Effect**

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dengan data pooling time series. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE) ( $X_1$ ), Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $X_2$ ), Dana Alokasi Umum (DAU) ( $X_3$ ), dan Dana Alokasi Khusus ( $X_4$ ), terhadap Produk Belanja Modal Kabupaten/Kota Sumatera Utara (Y).

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program statistik computer *Eviews* 9.0 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5.2 Hasil Random Effect

Variabel	Koefisien Regresi	Standart Error	t-statistik	Prob
Konstanta	7.604138	0.001358	5601.353	0.0000
PEI	5.63E-10	2.71E-10	2.077654	0.0398
LOG(PAD)	-0.001054	0.000265	-3.971489	0.0001
LOG(DAU)	0.000123	4.08E-05	3.000343	0.0032
LOG(DAK)	0.000234	6.27E-05	3.736345	0.0003

Adjusted R<sup>2</sup> : 0.687871

DW –test : 1.777258

Sumber : Hasil Olahan Data, Eviews 2019.

Secara matematis hasil dari regresi linier berganda dapat ditulis pada estimasi persamaan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 (PE)_{it} + \beta_2 LOG(PAD)_{it} + \beta_3 LOG(DAU)_{it} + \beta_4 LOG(DAK)_{it} + u_{it}$$

$$PDRB_{it} = 7.604138 + 5.63E-10PE_{it} - 0.001054PAD_{it} + 0.000123DAU_{it} + 0.000234DAK_{it} + u_{it}$$

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:

1. Ada hubungan positif antara PE dengan BM dan berpengaruh signifikan.
2. Ada hubungan negatif antara PAD dengan BM dan berpengaruh signifikan
3. Ada hubungan positif antara DAU dengan BM, dan berpengaruh signifikan.
4. Ada hubungan positif antara DAK dengan BM, dan berpengaruh signifikan.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai probabilitas PE 0.0398 < 0,05 maka dapat disimpulkan PE berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Artinya terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kurniawan, 2010).

**Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal**

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai probabilitas  $PAD\ 0.0001 < 0,05$  maka dapat disimpulkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Ini berarti semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal pada Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara Tahun 2013-2017 semakin rendah. Berdasarkan penemuan sebelumnya, (Jaya & Dwirandra, 2014) menemukan semakin besar PAD maka penerimaan tersebut digunakan dalam penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik sehingga besar juga Belanja Modalnya.

**Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian diketahui bahwa nilai probabilitas  $0.0032 < 0,05$  maka dapat disimpulkan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Ini berarti semakin besar Dana Alokasi Umum maka semakin besar pula Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2013-2017. Artinya semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah didalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah.

Menurut (Simanullang, 2013) penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

**Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai probabilitas  $0.0003 < 0,05$ , dapat disimpulkan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. Artinya semakin besar DAK yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan

pengadaan pelayanan dan fasilitas terbaik melalui Belanja Modal daerah. DAK kepada Belanja Modal ditemukan positif karena pemberian DAK diprioritaskan untuk mencapai tujuan dari program atau kegiatan tertentu untuk daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

**SIMPULAN**

Hasil penelitian ini menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara 2013-2017.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Boediono. (2013). *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Jaya, I., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(1), 79–92.
- Kumorotomo, W. (2011). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja, dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. *Journal JIANMaP*, 1(1), 1–22.
- Kurniawan Dwi Septian. (2010). Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo.
- Kusnandar, & Siswantoro, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *SNA XV Banjarmasin*, (32), 1–20.
- Peraturan menteri dalam negeri ri no 31 thn 2016. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, & 71. (2010). Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. (2010). Tentang Standar Akuntansi

- Pemerintahan.
- Prof. Dr. Abdul Halim, M. B. . A. (2014).  
Manajemen Keuangan Sektor Publik (edisi  
3). Jakarta: Salemba Empat.
- Rudy Badrudin. (2017). *Ekonomika Otonomi  
Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Simanullang, G. (2013). *Intergovernmental  
Revenue*. 1, 1–25.
- Sjafrizal. (2017). *Ekonomi wilayah dan perkotaan  
(Cetakan ke)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia, N. 23.  
(2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika*.  
Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zhang, F., Xue, H., Wang, H., & Dong, H.  
(2017). *Industrial Growth Path under the  
Restriction of Water Resources in*. *Procedia  
Engineering*, 174(1), 934–940. [https://doi.  
org/10.1016/j.proeng.2017.01.244](https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.244)